

PERAN *AFFECTION ATTACHMENT*, *PERCEIVED COST*, DAN *CONTINUANCE* SEBAGAI FAKTOR MODERASI: PENGUKURAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KINERJA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus di Pemerintah Daerah DIY)

Faridiah Aghadiati Fajri¹, Dianila Oktyawati²
faridiahagha@ugm.ac.id¹, dianila.oktyawati@ugm.ac.id²
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

Abstrak: Kebijakan desentralisasi pengelolaan keuangan memberikan dampak adanya variasi dalam praktik maupun kondisi keuangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini menuntut pemerintah daerah untuk menjaga kinerja dan akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dijalankan. Keandalan pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen utama yang dapat didukung oleh sistem informasi. Hal ini juga diatur dalam peraturan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. Sistem informasi memiliki lingkup yang luas dengan berbagai unsur di dalamnya. Salah satu unsur di dalamnya adalah pengguna. Unsur ini menjadi vital di organisasi pemerintahan karena membutuhkan komitmen individu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh komitmen organisasi dengan 3 pendekatan, yaitu *affective*, *perceived cost*, dan *normative* sebagai pemoderasi atas pemanfaatan sistem informasi terhadap kinerja dan akuntabilitas publik. Sehingga penelitian ini menggunakan individu pengguna sistem pengelolaan keuangan sebagai sampel penelitian agar mampu memetakan bagaimana penggunaan sistem informasi di pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kelekatan emosional dan kepercayaan atas tanggung jawab individu mampu meningkatkan dampak penggunaan sistem terhadap akuntabilitas dan kinerja manajerial.

Abstract: The decentralization policy of financial management has an impact on variations in practices and the financial conditions of local governments. This fiscal decentralization requires local governments to have good public performance and accountability to account for the various policies implemented. The reliability of financial management is supported by the information produced by information systems. This is also regulated that local governments are able to utilize and develop their information technology. The information system is a broader scope of the use of information technology. There are several elements, including the end-users. This element has a crucial role in government organizations because its need the individuals' commitment to use and develop information technology. This study aims to analyze the influence of organizational commitment which is affection, perceived cost, and normative as moderation constructs of the information systems utilization on public performance and accountability. This study's participants are individuals who utilize the financial management in order to be able to map how the information systems used in the local governments. The result shown that the factors of affective attachment and normative in individual responsibility are able to increase the impact of the system usage on accountability and managerial performance.

Keywords – *Affective, Managerial Performance, Normative, Perceived Cost, Accountability*

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan desentralisasi perencanaan dan pengelolaan menjadi kebijakan negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia

merupakan negara yang menerapkan sistem ini sebagai bentuk perwujudan demokrasi dan pembangunan nasional. Pemerintah daerah dengan otonomi ini diharapkan mampu mewadahi persepsi rakyat dari segi ekonomi maupun politik

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini mendukung pembangunan di suatu daerah berdasarkan aspirasi rakyat dan membutuhkan partisipasi masyarakat setempat. Desentralisasi mendukung percepatan laju pertumbuhan dan integrasi wilayah sehingga dapat meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal (Rondinelli 1981; Faquet 2004). Selain itu, masyarakat tersebut merupakan sasaran dari layanan yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah tidak lagi berperan sebagai pemimpin rakyat melainkan menjadi penyedia layanan bagi masyarakat. Hal ini menuntut adanya perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Desentralisasi mengubah pola investasi nasional secara signifikan. Kebutuhan pada tingkat lokal sangat mempengaruhi perubahan ini.

Desentralisasi fiskal merupakan proses distribusi dana dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola keuangan yang menjadi konsekuensi logis dari konsep uang mengikuti fungsi. Wewenang yang diberikan berupa kepastian sumber keuangan dari pemerintah pusat sesuai dengan delegasi serta pengelolaan pendapatan asli daerah yang diatur dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Desentralisasi fiskal ini memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap mengikuti peraturan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Terdapat variasi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia disebabkan yang disebabkan oleh otonomi daerah (Natrini & Ritonga 2017; Ritonga et al. 2013).

Otonomi ini diikuti dengan tuntutan akan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan organisasi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan yang disebut dengan akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo 2009). Akuntabilitas menjadi poin yang penting atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesehatan fiskal adalah konsep kompleks dan multidimensi sehingga harus diukur menggunakan berbagai indikator komprehensif (Zafra-gómez, et al., 2009; Hendrick, 2004).

Nilai rata-rata index pengungkapan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah (Magister-Akuntansi 2017) menunjukkan bahwa transparansi di Indonesia belum memenuhi unsur pengungkapan sehingga masuk dalam kategori sangat rendah dengan persentase rata-rata sebesar 24,85%.

Posisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di rangking 8 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indeks Maksigama

No.	Provinsi	Indeks (%)
1.	Provinsi DKI Jakarta	58,02
2.	Provinsi Aceh	49,07
3.	Provinsi Jawa Tengah	48,46
4.	Provinsi Jawa Timur	43,83
5.	Provinsi Kalimantan Tengah	43,21
6.	Provinsi Bali	41,98
7.	Provinsi Gorontalo	40,43
8.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	38,58

(Sumber: Maksigama, 2017)

Indeks Maksigama menunjukkan bahwa belum ada provinsi yang masuk ke

kategori *Sufficient* dengan kriteria rentang skor indeks 80-100. Daerah Istimewa Yogyakarta masih masuk ke tingkat keterbukaan *Insufficient* kategori minimal dengan indeks 38,58. Pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan menggunakan media website sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat luas.

Penggunaan sistem informasi berupa laman atau *website* mampu menjadi media informasi dan transparansi publik yang dalam hal ini merupakan bukti pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah tidak berhadapan dengan tuntutan laba seperti perusahaan bisnis, melainkan kemampuan untuk mengkombinasikan sumber daya agar mampu memberikan layanan terbaik dengan efisiensi biaya (Ritonga 2014).

Penggunaan teknologi informasi mampu menjadi *leverage* atas tuntutan tersebut. Keterlibatan pengguna terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kesuksesan implementasi sistem informasi di organisasi (Eldenburger, et al., 2010). Komitmen organisasi dari pengguna sistem informasi mampu meningkatkan penggunaan sistem yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Penelitian ini ingin memberikan bukti empiris bahwa penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi dari pengguna sistem informasi. Komitmen organisasi diukur menggunakan tiga pendekatan, yaitu *affective*, *perceived cost*, dan *normative*.

LANDASAN TEORI

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi dalam hal mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Peraturan ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan atas kebijakan yang dijalankan. Keberadaan sistem informasi juga mampu menyederhanakan hubungan birokrasi di pemerintahan karena sistem dapat bekerja *real time* sehingga waktu tunggu dan *bottle-neck* yang sering terjadi dapat diatasi.

Pemanfaatan teknologi sebagai pengelola informasi yang mampu menanggulangi permasalahan organisasi, seperti permasalahan *Bullwhip Effect* (Lee, et al., 1997). Organisasi dengan sistem informasi yang mampu mengelola informasi dengan baik akan dengan cepat merespon perubahan kebutuhan layanan dari masyarakat sehingga efek berantai dapat tertangani dengan maksimal.

Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban atas wewenang dan otoritas yang diberikan. Hal ini terkait bagaimana penyajian dan pengungkapan segala bentuk aktifitas yang sudah dijalankan. (Mardiasmo 2009) membagi akuntabilitas publik menjadi 4 dimensi.

1. Akuntabilitas dan kejujuran hukum
Dimensi akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) merupakan hasil dari penggunaan wewenang sesuai tugas dan fungsinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas proses
Dimensi ini mencakup kemampuan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Adanya akuntabilitas proses dapat memberikan keyakinan bahwa proses yang dilakukan dalam suatu aktivitas dapat distandarkan sehingga *output* dapat sesuai dengan sasaran.
3. Akuntabilitas program
Dimensi ini mengukur kinerja satuan kerja di pemerintahan berdasarkan pada pencapaian sasaran atau tujuan. Akuntabilitas ini juga mempertimbangkan bagaimana alternatif program disusun untuk memperoleh hasil yang optimal dengan biaya minimal. Penyusunan rencana dengan pilihan alternatif memungkinkan pengambil keputusan untuk membandingkan *output* dan *input* yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya sehingga program yang dipilih dapat efektif dan efisien.
4. Akuntabilitas kebijakan
Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil. Akuntabilitas ini mencerminkan bagaimana tujuan dari kebijakan yang diambil dapat tercapai dan sesuai dengan indikator-indikator keberhasilannya.

Akuntabilitas yang sudah dijelaskan melalui dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban organisasi dilakukan tidak hanya sebagai bentuk bukti pencapaian sasaran saja melainkan juga sebagai pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas dalam berbagai dimensinya juga dapat mencerminkan kinerja manajerial. Penggunaan sistem informasi di pemerintah daerah berperan sebagai infrastruktur yang mengurangi kesalahan proses, memudahkan

pengolahan data keuangan dengan volume yang besar, serta memberikan kecepatan proses sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas. (Indriasari dan Nahartyo 2008) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Penelitian mengenai pemodelan pengukur pemanfaatan teknologi informasi saat ini lebih banyak dilakukan di sektor *private*. Penelitian mengenai penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) terhadap tingkat risiko perusahaan menunjukkan hasil bahwa keberadaan ERP mampu menurunkan nilai risiko perusahaan secara signifikan (Tian & Xu, 2015). Namun penelitian tersebut menyebutkan adanya keterbatasan data, yaitu data yang digunakan hanya menangkap keberadaan sistem ERP, penelitian tersebut belum mampu memperoleh informasi lain, seperti komitmen organisasi.

Penelitian terdahulu memposisikan ketidakpastian sebagai variabel moderasi atas pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan laba. Penelitian Dos Santos & Peffers (1995) mengenai nilai kontribusi TI terhadap nilai pasar dilakukan untuk melihat keuntungan investor atas penerapan ATM pada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan yang lebih awal mengimplementasikan teknologi ini ternyata mampu memperoleh *value* pasar yang maksimal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan setelahnya.

Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1a: Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan affective sebagai variabel moderasi

H1b: Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan *perceived cost* sebagai variabel moderasi

H1c: Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan *normative* sebagai variabel moderasi

H2a: Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dengan *affective* sebagai variabel moderasi

H2b: Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dengan *perceived cost* sebagai variabel moderasi

H2c: Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dengan *normative* sebagai variabel moderasi

Selain itu, penelitian ini juga akan mengukur kemampuan akuntabilitas publik tersebut terhadap kinerja satuan kerja di pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dengan menggunakan akuntabilitas publik serta kinerja manajerial untuk mengukur *performance* pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan model regresi berikut:

$$AC = \beta_0 + \beta_1 PS + \beta_2 AF + \beta_3 PC + \beta_4 NO + \beta_5 PS*AF + \beta_6 PS*PC + \beta_7 PS*NO + \varepsilon$$

$$KM = \beta_0 + \beta_1 PS + \beta_2 AF + \beta_3 PC + \beta_4 NO + \beta_5 PS*AF + \beta_6 PS*PC + \beta_7 PS*NO + \varepsilon$$

Pengukuran konstruk pemanfaatan sistem informasi (PS) merupakan penggunaan teknologi informasi oleh user. Faktor-

faktor yang mempengaruhi komitmen individu diadaptasi dari penelitian Allen & Meyer (1990) yang dibangun menggunakan konstruk *Affective* (AF), *Perceived Cost* (PC), dan *Normative* (NO). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja instansi yang diproksikan menggunakan 2 variabel, yaitu Akuntabilitas (AC) dan Kinerja Manajerial (KM) yang diadaptasi dari penelitian Zeyn (2011) dan Putra (2013).

Studi ini mengukur enam konstruksi termasuk penggunaan sistem informasi, akuntabilitas, kinerja manajerial, *affective*, *perceived cost*, dan *normative*. Konstruksi ini diukur menggunakan skala multi-item yang ditarik dari pengukuran dalam penelitian sistem informasi berdasarkan skala lima poin yang berbeda. Semua skala item menggunakan skala Likert lima poin tersirat antara "sangat tidak setuju" dan "sangat setuju". Tabel 2 berisi definisi operasional dan sumber pengukuran konstruk.

Tabel 2. Konstruk Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional
<i>Affective</i>	Keterikatan afektif atau emosional individu terhadap organisasi
<i>Perceived Cost</i>	Pengakuan individu terhadap biaya atau opportunity cost terkait dengan penghentian aktivitas
<i>Normative</i>	Keyakinan bahwa loyalitas sebagai bentukan atas kewajiban moral individu dalam organisasi.
Sumber: Allen & Meyer (1990)	
Pemanfaatan Sistem Informasi	Penggunaan teknologi informasi dengan adanya integrasi aktivitas pada pelaksanaan tugas-tugas terkait pengelolaan keuangan
Sumber: Indriasari & Nahartyo (2008)	
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Sumber: Zeyn (2011)	
Kinerja Manajerial	Hasil kerja aparatur pemerintah daerah
Sumber: Putra (2013)	

Sampel penelitian ini menggunakan pengguna sistem informasi yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan integrasi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi ini penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrumen kuesioner. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer ini merupakan hasil kuesioner yang disebar oleh peneliti. Kuesioner akan disebar secara langsung oleh peneliti kepada sampel penelitian. Pengolahan data akan dilakukan menggunakan regresi berganda. Metode analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji keabsahan data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data empiris dari penelitian ini dikumpulkan dari pengguna akhir di instansi pemerintah daerah melalui kuesioner. Jumlah total kuesioner dikirim ke enam instansi pengelola keuangan dan aset pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKA) Provinsi DIY, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Sleman, BKAD Kabupaten Bantul, BKAD Kabupaten Kulonprogo, BKAD Kabupaten Gunungkidul) adalah 120 kuesioner. Mayoritas pengguna sistem yang menjadi responden adalah pengguna sistem di bagian akuntansi dan anggaran. Jumlah pengembalian sebanyak 115 kuesioner atau *response rate* 96%. Data

yang dapat diolah setelah melalui pengujian validitas dan reliabilitas sebanyak 113 data.

Tabel 3. Reliabilitas Konstruk

Konstruk	Mean	s.d.	Reliability
AK	31,20	3,39	,811
KM	30,07	6,37	,778
PS	33,55	4,37	,795
AF	30,75	3,55	,758
PC	22,58	5,78	,785
NO	20,56	2,59	,727

Legends: AK = Akuntabilitas, KM = Kinerja Manajerial, PS = Penggunaan Sistem, AF = Affective, PC = Perceived Cost, NO = Normative

Validitas konstruk untuk skala pengukuran (penggunaan sistem, akuntabilitas, kinerja manajerial, *affective*, *perceived cost*, dan *normative*) diukur menggunakan Breusch-Pagan (Baum & Schaffer 2003). Tabel 3 menyajikan skala dan korelasi antara semua variabel dalam model penelitian ini. *Composite Reliabilities* berkisar antara 0,727 dan 0,811 (lihat tabel 3). Dengan demikian, tidak ada masalah multikolinearitas.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dengan adanya moderasi faktor komitmen individu yang diuji dalam 2 tahap pengujian regresi. Pengujian tersebut menggunakan 2 variabel dependen, yaitu akuntabilitas dan kinerja manajerial. Hasil pengujian regresi untuk kedua model disajikan pada tabel 4. Model pertama yang berisi hubungan moderasi antara penggunaan sistem dengan faktor komitmen individu meliputi *affective*, *perceived cost*, dan *normative* terhadap akuntabilitas.

Model ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama. Hasilnya mengungkapkan bahwa terdapat 2 variabel

pembentuk komitmen individu yang mampu memoderasi penggunaan sistem secara signifikan terhadap akuntabilitas, yaitu *affective* dan *normative*. Variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan sistem yang diprediksi dengan $p < ,05$ dan koefisien *R-squared* (R^2) untuk model ini adalah 36,3% dari $F = 7,546$ (signifikan pada $p < ,05$). Hipotesis 1 mengusung adanya hubungan moderasi antara faktor pembentuk komitmen individu yang mampu mempengaruhi dampak penggunaan sistem terhadap akuntabilitas. Hasil tersebut mendukung 2 konstruk, yaitu *affective* (H1a) dan *normative* (H1c) yang mendukung adanya pengaruh penggunaan sistem terhadap akuntabilitas sedangkan *perceived cost* tidak memperoleh hasil yang signifikan. Pengujian statistik menunjukkan bahwa pengaruh moderasi dari *perceived cost* memiliki arah yang berlawanan dengan dampak penggunaan sistem. Dengan demikian hipotesis 1b tidak terdukung. Model pertama menghasilkan perhitungan statistik sebagai berikut.

$$AC = 7,546 + ,377PS + ,300AF - ,257PC + ,087NO \\ + ,548PS*AF + ,189PC \\ - ,276PS*NO + \varepsilon$$

Tabel 4. Analisis Regresi

Variabel Independen	Model 1	Model 2
PS	,377**	,274**
AF	,300**	,260**
PC	-,257**	-,232**
NO	,087	-,078
PSxAF	,548**	,564**
PSxPC	,189	-,056
PSxNO	-,276**	-,280**
R^2	,363	,207
F	7,546**	9,475**

Variabel Dependen: Model 1 = Akuntabilitas (AK),
Model 2 = Kinerja Manajerial (KM),

** $p < ,05$

Model kedua dalam penelitian ini menguji pengaruh moderasi faktor-faktor pembentuk komitmen individu atas dampak penggunaan sistem informasi terhadap kinerja manajerial. Hasil

pengujian statistik menunjukkan hasil yang sama dengan model 1, dimana variabel *perceived cost* (H2b) tidak mampu terdukung. Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor pembentuk yang mampu memoderasi adalah *affective* (H2a) dan *normative* (H2c) sehingga kedua hipotesis tersebut memperoleh dukungan. Pada model ini terdapat dua variabel moderasi yang memberikan dampak negatif pada dampak penggunaan sistem, yaitu *perceived cost* dan Model kedua menunjukkan bahwa kinerja manajerial dipengaruhi variabel independen dalam model sebagai berikut.

$$KM = 9,475 + ,274PS + ,260AF - ,232PC - ,078NO \\ + ,564PS*AF - ,056PC \\ - ,280PS*NO + \varepsilon$$

Penelitian ini memperoleh hasil signifikan untuk beberapa hipotesis. Pertama, argumen bahwa sistem informasi tidak hanya menjadi komponen infrastruktur dalam organisasi melainkan menjadi media penting dalam pencapaian keunggulan kompetitif organisasi. Infrastruktur yang terbentuk dengan proses implementasi sistem informasi tidak hanya berupa infrastruktur internal melainkan mampu menciptakan infrastruktur dengan pihak eksternal.

Sistem informasi ini mampu menjadi media pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan keterandalahan pelaporan keuangan. Pemrosesan informasi merupakan hal vital dalam organisasi. Informasi sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Model pemrosesan informasi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian tugas menuntut adanya informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. *The theory of organizational information processing* (Galbraith, 1974) menyebutkan bahwa tugas dasar organisasi adalah memproses informasi dengan berfokus pada ketidakpastian lingkungan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Efektifitas pemrosesan informasi di organisasi

memberikan nilai tambah pada pencapaian tujuan strategis.

Organizational Commitment merupakan sikap anggota organisasi yang menunjukkan seberapa besar keinginannya untuk sejalan dan berkembang di organisasi tersebut. Tingkat penerimaan atas tujuan organisasi yang berdampak pada keinginan berpartisipasi dan memenuhi tuntutan organisasi tersebut (Nazaruddin & Setyawan, 2012; Curtis & Wright, 2001). Komitmen individu yang tinggi berdampak pada persepsi dan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas akan mempengaruhi pola kinerja individu tersebut (Ricketta, 2002; Meyer, et al., 1993). *Affective Attachment* merupakan pendekatan yang paling umum digunakan. Faktor ini berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan penggunaan sistem informasi dengan akuntabilitas dan kinerja manajerial. Hal ini mendukung argumen bahwa komitmen ini diukur menggunakan keterikatan afektif atau emosional terhadap organisasi sehingga dapat menunjukkan individu dengan komitmen tinggi menikmati keanggotaan dalam organisasi. Keterikatan emosional terhadap pekerjaan dapat menurunkan tingkat perputaran karyawan dan meningkatkan kinerja (Reina, et al., 2017; Hunter, et al., 2007¹).

Komitmen yang dipandang individu sebagai kepercayaan terhadap tanggung jawab atau *normative* juga terbukti meningkatkan dampak penggunaan sistem informasi terhadap akuntabilitas dan kinerja manajerial. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang memandang komitmen sebagai bentuk kewajiban seorang karyawan. *Loyalitas* menjadi penting ketika terdapat kewajiban moral yang harus dijalankan. Komitmen individu secara *normative* mampu menurunkan keinginan untuk keluar dari pekerjaan (Meyer, et al., 2002).

Penelitian ini tidak mampu mendukung pendekatan *perceived cost* yang memandang komitmen sebagai pengakuan individu terhadap biaya atau *opportunity cost* terkait dengan penghentian aktivitas. Brett, et al. (1995) menunjukkan bahwa komitmen memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasional dikaitkan dengan kebutuhan keuangan. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan aktivitas secara berkelanjutan sebagai bentuk dari pemenuhan tuntutan dan pencapaian tujuan organisasi (Mcintyre, et al., 2014; Rusbult & Farrell, 1983; Becker, 1960). Namun, hal ini tidak berlaku pada individu yang bekerja di instansi pemerintahan yang belum mengukur pola kinerja dengan rinci untuk menentukan besaran nilai pendapatan individu terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi harus didukung dengan adanya komitmen organisasi dan individu. Hal ini erat kaitannya dengan pencapaian organisasi. Instansi pemerintah daerah memiliki indikator penilaian, beberapa diantaranya adalah akuntabilitas publik dan kinerja manajerial. Berbagai komponen pembentuk komitmen individual seperti keterikatan emosional dan tingkat kepercayaan atas tanggung jawab mampu meningkatkan dampak penggunaan sistem informasi terhadap akuntabilitas dan kinerja manajerial. Namun, pengakuan individu atas biaya yang melekat pada aktivitas yang dilakukan tidak mampu meningkatkan dampak tersebut sehingga hasil penelitian ini menyarankan adanya perbaikan penilaian kinerja di instansi pemerintahan. Nilai insentif yang melekat pada aktivitas serta target masing-masing individu akan membuat individu menjadi tergerak untuk optimal dalam penggunaan sistem. Hal ini juga akan berdampak pada

kinerja di aspek yang lain. Sebagai implikasi praktis, standarisasi proses dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan cepat dan responsif hal ini juga mampu mencerminkan efisiensi biaya. Dengan adanya indikator yang jelas terkait bagaimana komitmen organisasi mempengaruhi penggunaan sistem maka proses pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi menjadi lebih cepat dan memiliki *baseline* serta indikator yang tepat.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel instansi pengelola keuangan dan aset di provinsi DIY sehingga hasil penelitian ini menjadi kurang mampu digeneralisir ke tingkat makro. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas lingkup pengambilan sampel sehingga mampu menjelaskan dengan lebih terinci mengenai pola komitmen individu di masing-masing pemerintah daerah. Kedua, faktor *perceived cost* tidak memberikan dampak atas penggunaan sistem. Hal ini disebabkan karena tidak ada dampak moneter bagi individu yang tidak menggunakan sistem dengan optimal, *vice versa*. Ketiga, penelitian ini hanya mengukur akuntabilitas publik sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat membangun konstruk yang lebih lengkap menggunakan 4 dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, faktor pembentuk komitmen individu hanya diukur untuk responden di instansi pemerintah daerah saja. Penelitian selanjutnya dapat membuat perbandingan bagaimana faktor pembentuk yang sama dapat menghasilkan komitmen yang berbeda antara individu di instansi publik dan privat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Republik-Indonesia, *Peraturan Pemerintah*

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004.

- [2] D. A. Rondinelli, "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries," *Int. Rev. Adm. Sci.*, vol. 1, 1981.
- [3] J. Faguet, "Does decentralization increase responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia Does Decentralization Increase Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia," *LSE Res. Online*, vol. 88, pp. 867–893, 2004.
- [4] Republik-Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004.
- [5] N. D. Natrini and I. T. Ritonga, "Design and Analysis of Financial Condition Local Government Java and Bali (2013-2014)," in *SHS Web of Conference*, 2017.
- [6] I. T. Ritonga, C. Colin, and G. Wickremasinghe, "Factors Affecting Financial Condition Of Local Government In Indonesia," in *Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*, 2013, pp. 1–20.
- [7] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. 2009.
- [8] J. L. Zafra-gómez, A. M. López-hernández, and A. Hernández-bastida, "Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government," *Am. Rev. Public Adm.*, vol. 39, no. 4, pp. 425–449, 2009.
- [9] R. Hendrick, "Assessing and Measuring The Fiscal Health Of Local Governments Focus On Chicago," *Urban Aff. Rev.*, vol. 40, no. 1, pp. 78–114, 2004.
- [10] Magister-Akuntansi, *Maksigama Indeks Keuda*. 2017.
- [11] I. T. Ritonga, "Developing A Measure Of Local Government ' S," *J. Indones. Econ. Bus.*, vol. 29, no. 2, pp. 142–164, 2014.
- [12] L. Eldenburg, N. Soderstrom, V. Willis, and A. Wu, "Behavioral changes following the collaborative development of an accounting information system," *Accounting, Organ. Soc.*, vol. 35, no. 2, pp. 222–237, 2010.
- [13] Republik-Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 2005.
- [14] H. L. Lee, V. Padmanabhan, S. Whang, H. L. Lee, and V. P. Seungjin, "Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect," *Inform.*, vol. 43, no. 4, pp. 546–558, 1997.
- [15] D. Indriasari and E. Nahartyo, "Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan

- Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir),” in *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 2008.
- [16] B. L. Dos, K. Peffers, S. O. Science, N. M. Jun, B. L. Dos, and S. Ken, “Rewards to Investors in Innovative Information Technology Applications: First Movers and Early Followers in ATMs,” vol. 6, no. 3, pp. 241–259, 2017.
- [17] N. J. Allen and J. P. Meyer, “The measurement and antecedents of affective , continuance and normative commitment to the organization,” *J. Occup. Psychol.*, vol. 63, pp. 1–18, 1990.
- [18] E. Zeyn, “Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi,” *J. Reviu Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–37, 2011.
- [19] D. Putra, “Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah,” 2013.
- [20] C. Baum and M. E. Schaffer, “Instrumental variables and GMM: Estimation and Testing,” *Stata J.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–31, 2003.
- [21] I. Nazaruddin and H. Setyawan, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Akunt. dan Investasi*, vol. 12, pp. 197–207, 2012.
- [22] S. Curtis and D. Wright, “Retaining Employees - The Fast Track to Commitment,” *Manag. Res. News*, vol. 24, no. 8, pp. 59–64, 2001.
- [23] M. Riketta, “Attitudinal Organizational Commitment and Job Performance, A Meta-Analysis,” *J. Organ. Behav.*, vol. 23, no. 3, pp. 257–266, 2002.
- [24] J. P. Meyer, N. J. Allen, and C. A. Smith, “Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three- Component Conceptualization,” *J. Appl. Psychol.*, vol. 78, pp. 538–551, 1993.
- [25] L. W. Hunter, S. M. B. Thatcher, L. W. Hunter, and S. M. B. Thatcher, “Feeling the Heat: Effects of Stress, Commitment, and Job Experience on Job Performance,” *Acad. Manag. J.*, vol. 50, no. 4, pp. 953–968, 2007.
- [26] C. S. Reina, K. M. Rogers, S. J. Peterson, K. Byron, and P. W. Hom, “Quitting the Boss? The Role of Manager Influence Tactics and Employee Emotional Engagement in Voluntary Turnover,” *J. Leadersh. Organ. Stud.*, vol. 25, no. 1, pp. 5–18, 2017.
- [27] J. P. Meyer, D. J. Stanley, L. Herscovitch, and L. Topolnysky, “Affective , Continuance , and Normative Commitment to the Organization : A Meta-analysis of Antecedents , Correlates , and Consequences,” *J. Vocat. Behav.*, vol. 61, pp. 20–52, 2002.
- [28] J. F. Brett, W. L. Cron, and J. W. Solum, “Economic Dependency on Work: A Moderator of the Relationship between Organizational Commitment and Performance,” *Acad. Manag. J.*, vol. 38, no. 1, pp. 261–271, 1995.
- [29] K. P. McIntyre, B. A. Mattingly, G. W. L. Jr, and A. Simpson, “Workplace Self-Expansion : Implications for Job Satisfaction , Commitment , Self-Concept Clarity , and Self-Esteem Among the Employed and Unemployed,” *Basic Appl. Soc. Psych.*, pp. 59–69, 2014.
- [30] C. E. Rusbult and D. Farrell, “A Longitudinal Test of the Investment Model: The Impact on Job Satisfaction , Job Commitment , and Turnover of Variations in Rewards , Costs , Alternatives , and Investments,” *J. Appl. Psychol.*, vol. 68, no. 3, pp. 429–438, 1983.
- [31] H. S. Becker, “Notes on the Concept of Commitment,” *Am. J. Sociol.*, vol. 66, no. 1, pp. 32–40, 1960.